

BUDAYA KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN.

(Analisis partisipasi politik Perempuan di partai politik)

Nurhakki

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Abstract;

Culture is a form of communication habits of interaction that is built up in society. Patriarchal hegemony affects the dominant form of interaction and sub-dominant between male and female, have an impact on the lives of women reached the level of communication behavior. As a result, women in political roles at several barriers faced among others, the domestication of women who gave birth to a more intense interaction model is built on communal group (ingroup) and will be faced with the threat of cultural shock (culture shock) when dealing with multicultural culture outgroup political area is the domain of men. Women become silent (silent) due to frustrated communication (Communication frustrated) because the behavior of ethnocentrism, and experience the tension (anxiety) in communication. Stereotypes also one of the factors inhibiting women because of the quality of the universal generalized to the ability that is identical with the domestic. As a result, women do not occupy a strategic position of decision makers, and not involved in the process and results of political decisions that are less accommodating toward women. Political culture is still very strong with masculinity tend to use harsh methods and the most votes, and put men in decision-making, with the pattern of political rights of women administrators neglected, on the other hand women do not have the courage to be critical of the treatment these discriminatory. Yet culture is the result of the human mind open to change. If the problem of low female roles result from cultural communication although the approaches and strategies carried out with such communication approaches, capacity building of women by building an extensive interaction within the community, improve self-concept in a positive direction, and approach to parenting in the family.

Kata kunci: Komunikasi Budaya, Perempuan, Partisipasi Politik.

Pendahuluan

Manusia sangat dipengaruhi oleh budaya, dan terdapat hubungan timbal balik antara budaya dan komunikasi. *Culture is communication and communication is culture*¹, dan budayalah yang menjadi pijakan manusia dalam berkomunikasi. Budaya yang patriarkis sangat berpengaruh terhadap pembentukan kemampuan komunikasi perempuan. Budaya yang membentuk hubungan hirarkis berdasarkan gender (*gender stratification*), yang ditandai dengan hubungan interaksi dominan dan sub-dominan, inferior superior, ordinar

¹ Edward T.Hall dalam Dedi mulyana & Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Antar Budaya*, 2005

dan sub-ordinat, self dan the other. Model interaksi budaya komunikasi yang berpotensi terhadap peminggiran perempuan dari wilayah strategis pengambilan keputusan.

Tak dapat disangkal perempuan karena kontribusi budaya, telah mengadopsi perilaku komunikasi yang pasif karena adanya hubungan subordinasi terhadap mereka. Kesimetrisan hubungan interaksi menjadikan perempuan sulit untuk melakukan komunikasi yang emansipatif, yaitu perilaku yang aktif (berbicara) tetapi lebih dekat pada elemen-elemen pasif (seperti mendengarkan, dengan kata lain lahirnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam dunia politik merupakan efek dari relasi komunikasi yang tidak seimbang.

Kondisi kesenjangan tersebut menyentuh kesadaran banyak pihak, olehnya itu kesenjangan telah digenjot dengan melalui berbagai macam strategi termasuk regulasi *afirmatif action* yang melahirkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Namun sampai pada pemilu 2009 yang lalu upaya tersebut belum mampu mendongkrak kuantitas perempuan di kursi legislatif walau hanya sekedar memenuhi kuota 30%. Dengan demikian, masalah tersebut mesti dilihat dan dicarikan pemecahan dari berbagai perspektif salah satunya dari perspektif komunikasi. Sebab kunci utama keberhasilan partisipasi politik adalah komunikasi². Kompetensi komunikasi yang baik sangat berkontribusi positif terhadap partisipasi politik, sebab posisi elit politik menuntut kemampuan dalam transformasi pesan-pesan politik kepada khalayak dan menjadi *gatekeeper* arus lalu lintas berbagai pesan-pesan politik, harus mampu membentuk dan mempengaruhi opini publik, mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Kesemuanya itu adalah kompetensi komunikasi yang harus dimiliki, sementara pada umumnya perempuan karena asuhan budaya jauh dari potensi tersebut

Budaya Komunikasi, perilaku komunikasi yang berdampak pada partisipasi politik perempuan.

1. Stereotip dan domestikasi perempuan

Pada budaya patriarki, peran perempuan secara umum diasosiasikan dengan peran-peran domestik. Demikian mengakarnya budaya tersebut sehingga internalisasi budaya yang dialami oleh perempuan berfokus pada sektor domestik. Jika perempuan mengambil pilihan untuk berkiprah pada dunia politik, maka tanggung jawab domestik harus tetap diembannya karena tidak dibarengi dengan adanya sharing beban domestik dengan suami, sehingga tanggung jawab domestik dan politik dilakoni secara bersamaan. Peran ganda (*double burden*) perempuan tersebut sangat berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan oleh karena waktu yang digunakan untuk menjalankan aktivitas politik adalah waktu yang tersisa dari pekerjaan domestik. Jeratan kerja domestik inilah yang menjadikan perempuan kurang intens dalam menghadiri setiap rapat-rapat partai, sehingga setiap keputusan partai kurang melibatkan perempuan.

². Michael Rush & Alltof, *Pengantar Sosiologi Politik*, 2003,

Proses domestikasi perempuan juga dialami sejak dini dalam pendidikan keluarga. Segresi peran antara anak laki-laki dan anak perempuan sangat dikotomis, dimana anak laki-laki diasuh untuk meningkatkan kemampuan kepribadiannya dengan meningkatkan keterampilan (skill), sementara anak perempuan diasuh untuk fokus pada memperbaiki daya tarik diri, kemamuan pelayanan domestik, dan pengasuhan. Pola asuh tersebut merupakan konstruksi budaya yang kemudian menjadi pijakan dan diadaptasi oleh setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan dengan pandangan universal “perempuan adalah pekerja domestik dan laki-laki adalah pekerja publik dan pemegang peran kepemimpinan”. Internalisasi budaya tersebut menjadi suatu hegemoni dalam pembentukan karakter laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan kemampuan komunikasi, membangun interaksi, dan melakukan sosialisasi, serta menjadi *publik speaker* yang baik. Hal ini disebabkan karena setiap individu sangat menerima dan mempercayai budaya dimana setiap individu dibesarkan tanpa melihat bagaimana validitas objektif penanaman (*embeddednes*) budaya tersebut berdampak pada dirinya³. Dampaknya, perempuan pada umumnya menarik diri dari interaksi publik khususnya kegiatan-kegiatan politik sebagai hasil proses penanaman budaya tersebut. Meskipun terdapat perempuan yang memilih pilihan untuk terjun ke dunia polit namun hambatan budaya merupakan penghalang utama yang harus dihadapi.

Selain domestikasi, stereotip yang menjadi hambatan potensial perempuan dalam dunia politik. Hal ini disebabkan oleh karena stereotip mempersepsikan perempuan seakan-akan memiliki kualitas-kualitas tertentu⁴. Aspek-aspek negatif penggunaan stereotip meliputi: 1) Kategorisasi individu dengan karakteristik yang mudah diidentifikasi; 2) seperangkat atribut yang diberikan berdasarkan kategori tertentu sebagai bagian dari suatu kelompok, dan 3) seperangkat atribut yg dilabelkan sebagai anggota dari kelompok tersebut. Dalam menjalankan aktivitas politik, oleh karena adanya stereotip, perempuan diidentifikasi yang melahirkan atribut-atribut pelabelan dalam beberapa kategori seperti pekerja domestik, ibu rumah tangga, feminin, telaten, sabar, tidak berani mengkritik, dan sebagainya. Akibatnya, 1) dalam komposisi kepengurusan perempuan ditempatkan pada fungsi yang identik dengan peran domestik, mis, bendahara, atau seksi konsumsi. 2) perempuan diperlakukan diskriminatif dalam pengambilan keputusan partai politik dengan tidak mendahulukan mereka pada posisi yang menguntungkan perempuan.

Karena dunia politik terlanjur menjadi dominasi kaum laki-laki yang merupakan kelompok outgroup perempuan, perempuan mengalami Kejutan budaya (*cultural shock*) jika melakukan interaksi dengan *outgroup* mereka, oleh karena adanya beberapa perbedaan dengan kelompok *outgroup* tersebut antara lain: 1) *cultural differencess*, yaitu kejutan budaya karena kelompok interaksi berasal dari budaya yang berbeda, 2) *individual differences* yaitu kejutan budaya

³ Lihat harrie & moran dalam Dedi Mulyana & Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Antar Budaya*, 2005:55

⁴ Lihat Joseph A. Devito, 1997

akibat perbedaan individu dan faktor kemampuan seseorang, 3) *sojourn experience* yaitu kejutan budaya oleh karena perlakuan yang diterima dalam berinteraksi dengan budaya *outgroup* kita⁵. Ketiga faktor penyebab lahirnya kejutan budaya dihadapi oleh perempuan oleh karena laki-laki dan perempuan berasal dari budaya yang berbeda, laki-laki dan perempuan oleh karena proses asuhan dan adopsi budaya memiliki kemampuan yang berbeda, perempuan ketika memasuki dunia politik harus belajar pada budaya laki-laki dan cenderung mendapat perlakuan yang terabaikan dan diskriminatif.

Rendahnya keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam dunia politik sehingga perempuan menjadi mayoritas yang diam (*silent majority*) dalam masyarakat, atau dikategorikan sebagai kelompok bungkam (*muted groups*) karena model komunikasi didominasi oleh laki-laki⁶. Budaya masyarakat yang terstruktur berdasarkan gender menghasilkan model kontrol terhadap kelompok sub dominan (perempuan) dari kelompok yang dominan. *Frustrated communication* oleh karena hubungan dominasi secara implisit melahirkan realitas dan pandangan dunia perempuan mengikuti bahasa dari kelompok dominan oleh karena adanya kontrol. Perempuan sulit mempertahankan identitas diri, sementara memasuki identitas kelompok dominan juga tidak dapat dilakukan.

Dalam kaitannya dengan budaya bugis, perempuan dituntut untuk menampilkan sikap dan perilaku sebagai orang yang *male'bi* yaitu pola perilaku komunikasi yang tercermin pada perilaku yang tidak boleh mengambil suatu inisiatif atau pengungkapan secara eksplisit atas keinginan mereka, dan tidak boleh memberi penolakan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak disukai. Nilai budaya tersebut meskipun dianggap positif tetapi berdampak negatif dalam membangun karakter komunikasi perempuan. Dengan demikian terbangun budaya komunikasi perempuan untuk tidak menjadi diri sendiri (*self*) melainkan tetap menjadi yang lain (*the other*) dalam menyampaikan pendapat. Semua itu adalah hasil dari asuhan budaya.

2. Interaksi komunitas perempuan

Peran perempuan dalam sebuah rumah tangga di masyarakat bugis disebut *panganro bola*, masyarakat toraja menyebutnya sebagai *toma'nasu*, dan beberapa budaya lain secara umum menempatkan perempuan pada sektor domestik. Dalam interaksi masyarakat pun fungsi perempuan diikat pada fungsi-fungsi domestik sampai pada level sosialisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, peran yang diberikan harus identik dengan domestik. Kecenderungan tersebut dapat dilihat pada struktural masyarakat, misalnya: PKK, Dasa Wisma, kelompok Posyandu, kelompok pengajian dan arisan. Melalui kelompok komunitas *ingroup* perempuan, mereka mampu membangun kompetensi komunikasinya dilingkungan tersebut. Budaya internal komunitas menjadi acuan sikap dan perilaku komunikasi, sehingga kondisi homofily oleh persamaan status dan jenis

⁵ Lihat Furnham & boncher dalam Josef Eilers, *Communicating Between Cultures*, 1992.

⁶ Lihat Ardener dalam Henrietta L. Moree, *Feminisme and Antropology*, 1998:3

kelamin menjadikan mereka memiliki keberanian melakukan komunikasi emansipatif tanpa ada kekhawatiran ditertawakan. Budaya komunikasi homofily yang telah melekat pada diri perempuan akan menyulitkan perempuan ketika berinteraksi dengan kelompok heterogen dari outgroup dalam wilayah politik, perempuan akan mengalami frustrasi komunikasi (*frustrated Communication*) karena kehadiran mereka inferior dan sub-dominan. Frustrasi komunikasi disebabkan oleh, pertama jika perempuan berbicara dengan tipikalnya, tidak didengarkan (yang lain juga berbicara), dan meniru cara komunikasi laki-laki sulit dilakukan. Kedua, hubungan yang simetris oleh karena adanya kontrol, dominasi, dan struktur, tidak ada kesetaraan dalam kelompok interaksi tersebut.

Karena lebih sering berinteraksi dengan komunitas mereka, perempuan mengalami ketegangan (*anxiety*) selama interaksi yang disebabkan oleh adanya perasaan asing dan tingkat ketidakpastian (*uncertainly*) yang tinggi karena adanya dugaan negatif. Empat konsekuensi negatif akibat perasaan asing: 1) ketakutan akan ketidakmampuan mempertahankan diri dan mengantisipasi kekurangan dalam mempertahankan identitas diri; 2) ketakutan perilaku negatif ketika situasi dikuasai orang lain; 3) ketakutan evaluasi negatif dari orang asing; 4) ketakutan penilaian dari anggota *ingruop* dengan menggolongkan kedalam kelompok *outgroup*⁷. Keempat situasi tersebut membuat perempuan kurang partisipatif dalam setiap rapat-rapat partai dan sulit berkomunikasi dengan efektif.

Pola pikir masyarakat juga berdampak pada rendahnya partisipasi politik perempuan. Ketika perempuan muncul ke masyarakat untuk melakukan aktivitas politik, meskipun memiliki kompetensi dibidang tersebut masyarakat tidak serta merta menerima kehadiran mereka layaknya politisi laki-laki, bahkan kehadiran mereka disertai dengan pertanyaan “apakah mampu karena dia adalah perempuan?”. Politisasi bahasa kemuadain muncul untuk memojokkan posisi mereka misalnya “sayang perempuan”. Hal ini diakibatkan karena model kepemimpinan dari generasi ke generasi selalu menjadi domain laki-laki sehingga kehadiran mereka direspon secara negatif. Hal ini pula menyulitkan perempuan memegang peranan tersebut karena sangat sedikit perempuan yang menjadi model kepemimpinan bahkan perempuan tersebut oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang berperilaku *deviants* atau menyimpang⁸.

Terakhir analisa dampak budaya patriarki terhadap bungkamnya perempuan dalam dunia politik oleh karena: 1) perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda karena pemisahan tenaga kerja dalam masyarakat; 2) kaum laki-laki lebih dominan secara politis dalam masyarakat, oleh sebab itu sistem persepsi mereka menjadi lebih dominan, yang menyebabkan persepsi kaum perempuan tidak diadopsi secara luas; 3) kaum perempuan harus menerjemahkan cara-cara

⁷ Lihat Stephan dalam B. William Gudikunts & Kim Yun, *Communicating With Strangers: An Aproch To Intercultural Communication*, 1984:15

⁸ Lihat Princeton dalam Dedi Mulyana & Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Antar Budaya*: 2005: 54

pemahaman mereka sendiri kedalam pengertian-pengertian laki-laki tentang dunia untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik⁹.

Hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam meningkatkan partisipasi politik

1. Budaya Partai Politik.

Upaya *affirmatif action* untuk mendorong jumlah keterwakilan perempuan dalam peran politik telah dilakukan melalui amanat undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, belum memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap bertambahnya jumlah perempuan di legislatif mulai dari pusat sampai pada hasil pemilu di setiap daerah. Hambatan ini tidak bisa lepas dari bagaimana partai politik yang belum memiliki komitmen kuat untuk meloloskan Calon legislatif perempuan. Indikatornya antara lain: 1) partai belum mengambil inisiatif untuk melakukan *treatment* khusus kepada kader perempuan dengan memberikan peranan penting di dalam kepengurusan partai, dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada pengurus perempuan; 2) adanya diskriminasi dalam mengisi struktur kepengurusan, perempuan dilibatkan hanya pada bidang-bidang tertentu; 3) Partai kurang akomodatif bahkan diskriminatif dalam mengusung kader perempuan pada proses pencalekan, sebagai contoh di Kabupaten Enrekang pada pemilu 2009 lalu: Nurbaya barung aktif dipartai Golkar dari tahun 1967 tapi belum pernah diberi jabatan pimpinan, dalam pemilu legislatif 2009 Hj. Nurbaya barung, SE diposisikan pada nomor urut 3 dibawah Syafruddin, SH yg baru bergabung di partai Golkar Kabupaten Enrekang menjelang pemilu diadakan. Artinya, meskipun loyalitas perempuan terhadap partai cukup bagus tidak menjadikan mereka diapresiasi untuk mendapatkan hak-hak politik setara dengan laki-laki. Dalam aturan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik juga mengatur nomor urut *Zipper sistem*, namun lagi-lagi yang nampak bahwa perempuan diposisikan pada nomor urut tiga (3) paling bawah dari nomor zig-zag tersebut; 4) Budaya pengambilan keputusan partai yang diwarnai dengan perilaku komunikasi yang kasar menyulitkan perempuan untuk dapat beradaptasi; 5) waktu pelaksanaan rapat-rapat partai biasanya dilakukan pada malam hari atau waktu-waktu bersamaan dengan kerja domestik perempuan sehingga kehadiran dan keterlibatan mereka sangat minim.

2. Tingkat popularitas perempuan.

Kurangnya interaksi publik yang dibangun politisi perempuan, oleh minimnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang diikuti semakin mempersempit peluang untuk mendapat dukungan. Popularitas politik penting menjadi salah satu penentu yang mendorong pemilih untuk memilih calon legislatif. Sistem pemilihan dengan penentuan wakil terpilih berdasarkan suara terbanyak, menempatkan popularitas kunci mendapatkan dukungan. Popularitas sangat terkait dengan pencitraan, dan membangun persepsi interpersonal pendukung tentang politisi perempuan demi melahirkan kepercayaan terhadap mereka.

⁹ Lihat Kramare dalam Little john, 1999: 416

3. *Budaya internal perempuan.*

Dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri masih terdapat perempuan yang menganut pemahaman konservatif yang memandang peran politik hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki, ketika diberi kesempatan selalu menolak dengan alasan ‘saya adalah perempuan’. Dalam diri perempuan belum berani, atau merasa sungkan melakukan protes dan kritik ketika diperhadapkan pada keputusan partai yang diskriminatif, perempuan melakukan pembiaran sehingga perlakuan tersebut dari waktu ke waktu tetap menimpa diri mereka.

Strategi peningkatan partisipasi politik perempuan

1. *Pendekatan pola asuh keluarga.*

Pada dasar bahwa penanaman budaya begitu kuat menginternalisasikan nilai-nilai dan budaya interkasi sebagaimana pada telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, sehingga untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan harus berangkat dari penanaman (*embadedness*) atau pembiasaan dalam pola asuh keluarga. *Sharing* kerja domestik antara anak laki-laki dan perempuan harus sejak dini ditanamkan pada diri masing-masing anak sehingga kebiasaan tersebut melekat pada kebiasaan dan menjadi budaya internal masing-masing individu yang melekat menjadi suatu nilai, nilai positifnya adalah tidak terjadi pembagian sektor kerja berdasarkan jenis kelamin karena sektor kerja adalah *cultur* (konstruksi sosial) bukan *nurture* dan terbuka pada perubahan. Nilai positif lainnya adalah antara anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan atau waktu luang yang sama untuk belajar dan bersosialisasi serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

2. *Sosialisasi dan jaringan komunikasi*

Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Proses sosialisasi merupakan *treatment* atau terapi komunikasi untuk dapat berinteraksi pada masyarakat yang *multikultural*. Melalui interaksi, dalam proses sosialisasi perempuan akan merasakan kebiasaan-kebiasaan berada pada masyarakat heterogen, heteropily ini menjadi proses adaptasi diri pada perbedaan budaya yang secara perlahan tidak akan menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Dari segi pola pikir masyarakat, dengan melalui proses kehadiran perempuan oleh masyarakat tidak lagi dianggap suatu hal yang tabu, dan perempuan tidak pula merasa sungkan (*delicacy*), karena kehadiran mereka bukan lagi sesuatu yang baru. Jaringan komunikasi sesama politisi perempuan antar daerah pemilihan penting untuk *share* informasi dan dukungan.

3. *Capacity Building*

Dalam upaya peningkatan keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam ranah politik, meskipun telah diatur tentang kuota 30% melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, namun untuk meraih posisi tersebut perempuan

harus berbenah dan membangun kapasitas diri dalam beberapa dimensi, terutama dari kemampuan komunikasi antara lain:

- Intelektualitas yang mapan dapat membimbing pada kesadaran dan membentuk sikap mental yang kuat. Memiliki kemampuan untuk dapat mengetahui penyebab dan motivasi setiap perilaku dan memahami perilaku orang lain dan diri sendiri¹⁰ dalam setiap interaksi merasakan relativisme budaya.
- *self concept positif* dalam berinteraksi pada budaya yang berbeda, artinya, politisi perempuan harus mampu mempertahankan identitas diri dalam berkomunikasi dengan *outgroup* mereka dengan tidak over sensitif terhadap kritikan atau terlalu over responsif terhadap pujian. Perbedaan budaya harus mampu dirasakan secara dinamis yang akan membawa pada kesadaran diri (*self awareness*) membangun komunikasi yang efektif.
- *open self* untuk memberikan ciri feminin dalam bahasa politik yang santun, namun tetap memiliki keberanian menuntut hak-hak politik terhadap perlakuan diskriminatif.
- Kemampuan bersosialisasi secara luas, melakukan Lobby dan negosiasi, membentuk dan mengarahkan opini publik.

Penutup

Budaya menjadi pijakan, referensi, dan diadopsi setiap individu dalam melakukan komunikasi. Pengaruh budaya terhadap sikap dan perilaku komunikasi perempuan adalah bungkam (*silent*) dalam dunia politik. Tidak mempunya perempuan bersuara, melakukan interaksi merupakan awal rendahnya keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam wilayah pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu strategi baru penting dibangun baik dalam masyarakat maupun dalam individu yaitu budaya komunikasi yang setara.

Daftar Pustaka

- Devito. A. Joseph. 1997. *Human Communication*. Terjemahan agus maulana. Profesional books. Jakarta.
- Gudikunts, B. William & Yun, Kim. 1984. *Communicating with strangers: An Approach To Intercultural Communication*. McGraw. Hilling, USA
- Josef, Eilers. 1992. *Communicating Between Cultures, An Introduction To Intercultural Communication*. Divine Word Publication, Manila.
- Little John, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication (fifth edition)*. Wadsworth Publishing Company. California, USA.
- Mulyana, Dedi & Rahmat, Jalaluddin, 2005, *Komunikasi Antar Budaya*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

¹⁰ Lihat Fiske & Taylor, dalam Josep A. Devito,

Moore, L. Henrietta: 1988. *Feminism and Antropology*. T.J Press (Padstow) Ltd, Cornwall, Singapore

Raga, Rafael: 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineke Cipta, Jakarta.

Rush, Michael & Althoff. 2003, *pengantar sosiologi politik*. PT, raja Grafindo Perkasa, Jakarta.